

## Tjahjo Kumolo Dirawat Intensif di RS, Mahfud MD Jadi Menpan-RB Ad Interim

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD untuk sementara waktu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang dirawat intensif di Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo.

Mahfud pun membagikan kabar kondisi terbaru politikus senior PDIP tersebut. Menurutnya, yang bersangkutan kondisinya kini telah membaik. Akan tetapi, Tjahjo memang masih dirawat dalam rangka pemulihan.

"Pak Tjahjo sakit dan sedang dalam perawatan intensif. Sudah mulai membaik tapi masih tetap harus dirawat untuk recovery," ujar Mahfud di Jakarta, Jumat (24/6).

Jabatan sementara itu sudah diemban Mahfud sejak Senin (20/6) lalu. Pada Jumat (24/6), Mahfud memberikan pengarahannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

"Sebagai Menko dan Menteri PAN RB ad Interim tadi saya memberi pengarahannya pada Rakornas tentang Pegawai Non-ASN, Tenaga Honorar, dan Outsourcing," katanya.

Dikatakan Mahfud, dirinya tak mengalami kesulitan menggantikan posisi sementara

Tjahjo. Sebab, kata dia, selama ini Tjahjo telah melakukan tugas secara rapih dan terstruktur.

"Semua tugas bisa dihandle dengan baik karena Pak Tjahjo sudah lama menata instrumen hukum dan kelembagaan dengan baik," jelasnya.

Mahfud mengatakan, para pejabat di tingkat eselon I di jajaran PAN-RB telah menguasai masing-masing tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Mahfud pun mengajak seluruh pihak mendoakan kesembuhan bagi Tjahjo Kumolo.

"Pejabat-pejabat Eselon I di Kem-PANRB juga menguasai tupoksi masing-masing. Doakan agar Pak Tjahjo terus senakin membaik," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris PAN-RB, Rini Widyantini, membenarkan Tjahjo Kumolo tengah sakit. Tjahjo kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. "Betul Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Beliau tidak koma, namun harus menjalani perawatan secara intensif sampai kondisi keseluruhan stabil dan membaik," ujar Rini saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (24/6/). ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## PELUNCURAN SIPOL PEMILU 2024

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menunjukkan tampilan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (24/6). KPU meluncurkan Sipol Pemilu 2024 dan telah membuka aksesnya untuk memperlancar proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.

# Mendagri Berharap TNI Dapat Cegah Potensi Konflik Jelang Pemilu 2024

Belajar dari pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tersebut rawan menimbulkan polarisasi, politik identitas, dan maraknya berita bohong.

JAKARTA (IM) - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap jajaran TNI dapat membantu mencegah potensi konflik dan penyaluran logistik Pemilu. Hal itu mengingat TNI memiliki jaringan luas untuk menjaga keamanan dan mengendalikan potensi konflik.

Hal tersebut disampaikan Tito saat memberi ceramah pada kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Terpusat Tahun Anggaran 2022, Kamis (23/6).

Tito mengatakan, tak lama lagi tahapan pendaftaran peserta Pemilu akan berlangsung. Kondisi ini akan membuat suhu politik kian meningkat karena kandidat mulai menghimpun basis massa. Ini

akan berlanjut, jika nanti Pemilu digelar dalam dua putaran karena tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara 50 persen plus satu.

"Nah sehingga rekan-rekan sekalian memang ada beberapa problema yang perlu kita waspadai," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (24/6).

Tito lebih lanjut menuturkan, tak sedikit masyarakat yang masih bersifat pragmatis dan belum memahami esensi demokrasi. Sikap ini akan berpengaruh terhadap maraknya praktik politik uang yang akan mengurangi nilai demokrasi, bahkan menjadi potensi konflik.

Karena itu, mantan Kapolri itu berharap adanya pengendalian situasi. Sebab, belajar dari pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tersebut rawan menimbulkan polarisasi, politik

identitas, dan maraknya berita bohong. "Perlu ada semacam cooling system, sistem untuk mendinginkan, perbedaan potensi konflik pasti akan ada. Yang kita cegah adalah jangan sampai potensi itu menjadi konflik kekerasan yang menghancurkan antara anak bangsa," katanya.

Pengendalian tersebut, lanjut Mendagri, salah satunya membutuhkan peran dari jajaran TNI termasuk Polri yang merupakan bagian dari perekat bangsa. Ini dilakukan salah satunya dengan memetakan daerah yang memiliki kerawanan konflik. Dengan begitu, dukungan pasukan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kerawanan tersebut.

Di lain sisi, dukungan TNI di bidang penyaluran logistik Pemilu juga dibutuhkan. Terlebih TNI memiliki banyak sarana dan prasarana, baik di udara, laut, maupun darat. Dukungan tersebut dibutuhkan karena waktu penyediaan logistik begitu singkat. Tanpa dukungan TNI pendistribusian itu akan sulit berjalan cepat,

mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas.

"Oleh karena itu (dukungan) distribusi logistik dari rekan TNI dan Polri seperti tahun-tahun sebelumnya di masa-masa sebelumnya sangat diperlukan," kata Mendagri.

Sebagaimana diketahui, Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024. Waktu pemungutan suara Pemilu telah disepakati pada 14 Februari

2024. Sementara pemungutan suara Pilkada Serentak akan berlangsung pada November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah meluncurkan tahapan awal Pemilu pada 14 Juni 2022.

"Pemilu dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pilkada. Pilkada pertama kali serempak di 541 daerah kecuali tadi Gubernur (dan) Wakil Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta)," ucapnya. ● han

## DPR dan Pemerintah Sinkronisasi Tiga RUU Daerah Otonomi Baru Papua

JAKARTA (IM) - Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Papua melakukan sinkronisasi terhadap 3 (Tiga) RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

"Dalam Rapat Timus dan Timsin yang dilaksanakan terdapat 3 (Tiga) draft RUU yang sudah berhasil di sinkronisasi yaitu, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Papua Tengah, dan RUU Papua Pegunungan," kata

Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan, Dalam Rapat Timus dan Timsin yang dilaksanakan PADA Jumat (24/6) terdapat 3 (Tiga) draft RUU yang berhasil di sinkronisasi yaitu, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Papua Tengah, dan RUU Papua Pegunungan

Selain itu, Pimpinan Komisi II DPR RI dan anggota Komisi II DPR RI, bersama Pemerintah akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada 24 hingga 26 Juni 2022. Kunjungan kerja itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait pembahasan RUU tentang pemekaran di Provinsi Papua, melakukan uji publik dan meninjau masukan kembali.

"Proses pembahasan Otusus Papua dan pemekaran Papua sejatinya sudah dibahas sejak bulan Juli tahun 2021,

jadi proses ini sebenarnya sudah 1(satu) tahun menjangkau masuk dari berbagai elemen masyarakat sejak disahkannya UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otus Papua," tutup Bahtiar

Rapat dipimpin Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dan pimpinan Komisi II DPR RI serta Anggota Komisi II DPR RI.

Sedangkan dari Pemerintah, dihadiri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didampingi Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Oda Kemendagri Valentinus Sudarjanto, serta Direktur Toponimi dan batas daerah pada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugarto.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Velix Vernando Wanggai, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemendikhum Roberia, serta Pejabat perwakilan Kemenkeu RI. ● han

## Penyidik KPK Panggil Karyawan BUMN Terkait Korupsi LNG Pertamina

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menghadakan pemeriksaan terhadap para saksi untuk mengust kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (PTM) Persero tahun 2011-2021.

Beberapa di antara para saksi tersebut, merupakan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para Karyawan BUMN yang dipanggil KPK yakni, Hero Hariyanto; Agus Sugiarso; dan Dian Mardiana.

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil dua Pensiunan BUMN yakni, Mohamad Taufik Afianto dan Nursatyo Argo, serta senior Analyst Fraud Prevention & Digital Forensic PT Pertamina, Nanung Karnasi Wibowo serta dua Karyawan Eni Muara Bakau, Anita dan Derry Sylvan juga turut dipanggil KPK hari ini.

"Hari ini (Jumat 24/6) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan LNG Pertamina. Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali

Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (24/6).

Diketahui sebelumnya, KPK mulai meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (PTM) Persero tahun 2011-2021 dari tahap penyelidikan ke penyidikan. KPK juga telah menetapkan penyidikan perkara tersebut.

Namun sayang, KPK masih merahasiakan nama-nama yang mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait korupsi pengadaan LNG di Pertamina. Bukti permulaan tersebut, saat ini sedang diteliti lebih lanjut ke sejumlah saksi.

"Benar, KPK saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT PTM (Pertamina) tahun 2011-2021," kata Ali.

KPK berjanji akan menginformasikan secara detail terkait para tersangka serta konstruksi perkara ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. KPK menyatakan bakal transparan dalam proses penyidikan perkara ini. ● mei

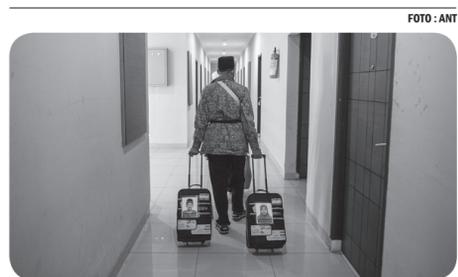


FOTO: ANT

## JAMAAH CALON HAJI TIBA DI ASRAMA HAJI PALEMBANG

Seorang calon haji kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Palembang berjalan menuju kamar setibanya di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/6). Sebanyak 450 jamaah calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur tiba di Asrama Haji Palembang dan akan diterbangkan ke tanah suci pada Sabtu (25/6).

## Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Selama Dibuka 135 Hari

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka tahapan pendaftaran partai politik (parpol) yang hendak mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung selama 135 hari.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisioner KPU, Idham Holik saat meluncurkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 pada Jumat (24/6) di Kantor KPU RI, Menteng Jakarta Pusat.

"Tahapan pendaftaran partai politik akan dilaksanakan selama 135 hari yang dimulai pada 29 Juli - 3 Desember 2022," ujar Idham Holik.

Ia mengungkapkan, penetapan parpol peserta pemilu itu 14 Desember 2022 sesuai perintah UU Nomor 7 Tahun 2017, di mana proses pendaftaran dan verifikasi partai politik itu dilakukan selama 4 bulan.

"Diawali 18 bulan jelang hari pemungutan suara dan sudah ditetapkan partai politik

yang menjadi peserta pemilu pada 14 bulan sebelum hari pemungutan suara," ujar Idham Holik.

Terkait tahapan pendaftaran parpol ini dibuka dan diakhiri tentang waktu pendaftaran partai politik sebagai penjelasan lebih rinci dari Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022.

"Di mana, pendaftaran partai politik itu pada 1-14 Agustus 2022," kata Idham Holik.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan terkait persyaratan pendaftaran parpol lebih rinci ada di Pasal 173 Ayat (2) atau Pasal 177 UU RI Nomor 7 Tahun 2017. Terkait pendaftaran parpol tersebut di Pasal 176 Ayat (1) dan (3), calon peserta yakni parpol harus menunjukkan dokumen persyaratan yang lengkap.

"Harus diserahkan saat masa rentang pendaftaran yakni pada 1-14 Agustus 2022," ujar Idham Holik. ● han

## Minta Jokowi Tak Reshuffle Lagi, Paloh: Kurang Berbobot Namanya

JAKARTA (IM) - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet lagi. Paloh menyayangkan jika pemerintah terlalu sering melakukan reshuffle.

"Ya sayangnya kalau kita sering-sering reshuffle. Itu kan sayang. Kurang berbobot namanya," ujar Paloh dalam program Satu Meja, seperti dilihat melalui siaran YouTube Kompas TV, Jumat (24/6).

Paloh menilai, tingkat kewibawaan pemerintahan jadi terganggu jika reshuffle terlalu sering dilakukan. "Itu automatically. Jadi saya pikir ini masih batas apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, ya inilah dia dengan segala kurang lebuhnya. Saya pikir lebih banyak lebuhnya," tuturnya.

Paloh mengungkapkan bahwa tidak ada persoalan serius yang dibahas oleh Jokowi dengan para ketum parpol sebelum reshuffle dilakukan pada Rabu (15/6) lalu. Semua pembicaraan dalam pertemuan itu han-

ya obrolan ringan. Meski demikian, Paloh tidak menampik bahwa ada diskusi menarik yang terjadi antara ketum parpol dan Jokowi saat itu.

Paloh mengaku memberi masukan kepada Jokowi saat itu. Dia mengatakan kepada Jokowi bahwa Indonesia harus bersyukur karena tidak masuk ke dalam daftar negara yang berpotensi gagal.

"Tapi untuk agar kita tidak termasuk ke arah salah satu daftar dari nama-nama list negara yang gagal itu, satu hal yang tak bisa ditawarkan, sejak saat ini juga kita harus mampu memperkuat kemampuan yang ada. Kita sebagai suatu bangsa untuk memperkuat yang namanya stabilitas nasional. Itu tidak bisa ditawarkan-tawar. Karena ancaman resesi itu jelas ada," kata Paloh.

Paloh menjelaskan, puluhan negara yang gagal menunjukkan betapa kacanya tatanan kehidupan bangsa tersebut. Maka dari itu, kata Paloh, masyarakat harus membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. ● han

## Nasdem Selalu Kedepankan Inklusivitas dan Bekerjasama dengan Semua Parpol

JAKARTA (IM) - PDI Perjuangan menutup pintu kerja sama atau koalisi dengan PKS dan Demokrat dalam Pilpres 2024. Hal ini berbeda dengan Partai Nasdem yang selalu membuka diri untuk membangun kerja sama dengan partai lain.

Tim Kerja Pemenangan Pemilu Jawa I (Banten dan DKI) DPP Partai Nasdem, Bestari Baru menyebutkan pihaknya selama ini selalu mengedepankan inklusivitas dalam membangun bangsa dan berkolaborasi dengan semua partai politik.

"Nasdem partai yang konsisten bekerja sama dengan partai manapun. Konsistensi dilaksanakan hingga ke bawah dari Pilkada Kabupaten Kota," ujar Bestari ketika dikonfirmasi, Jumat (24/6).

Menurutnya, apa yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait menutup pintu kerja sama dengan PKS dan Demokrat amat berbeda dengan sikap Nasdem.

"Saya tidak mengerti apa yang dimaksud Hasto. Saya hanya membandingkan dengan partai kami, kami bisa bekerja sama dengan partai

manapun dengan mengedepankan kebersamaan," tutur Bestari.

Ia menyebut, partainya siap berkolaborasi dengan partai politik lainnya dengan memastikan memiliki nilai-nilai Pancasila.

"Kita sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kami punya prinsip tidak sekedar menjalankan rutinitas pembagian kekuasaan. Selama satu visi ke depan bisa.

Partai manapun adalah aset bangsa. Bagi Nasdem tidak ada masalah bekerja sama dengan partai manapun asalkan satu tujuan," pungkas Bestari.

Sementara itu dikesempatan terpisah, Wasekjen Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan pertemuan antara Nasdem dengan pks dan Partai Demokrat sebagai sebuah ajang silaturahmi dan pendekatan kerja sama.

"Apa yang kami lakukan ini silaturahmi. Dialog seperti ini harus kita lakukan. Kalau memang ada bertautan ya kita sama-sama. Namun sampai sekarang belum ada ikatan apapun. Masih pendekatan. Masih terlalu jauh kalau dikatakan koalisi," ujar Hermawi Taslim.



FOTO: ANT

## AKSI PROTES PENYIKSAAN BURUH MIGRAN DI MALAYSIA

Sejumlah pengunjung rasa yang tergabung di Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta, Jumat (24/6). Pengunjung rasa menyampaikan protes kepada pemerintah Malaysia terkait penyalakan dan kematian buruh migran Indonesia dalam Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia.